



Laporan Riset

Menyoal Risiko dan Kontingensi Pengetahuan dalam Masyarakat Pengetahuan Kontemporer

Hendar Putranto*

Universitas Multimedia Nusantara 1 Serikat Dosen Indonesia

Info Artikel

Sejarah artikel:

Dikirim 9 Desember 2016

Direvisi 24 Desember 2016

Diterima 29 Desember 2016

Kata Kunci:

Serikat

Dosen

Guru

Pahlawan

Jasa

Abstrak

“Guru (dosen) adalah pengabdian masyarakat tanpa tanda jasa”, maka tidak perlu berharap terlalu banyak bahwa ada pihak lain yang akan memerhatikan, apalagi memperjuangkannya secara konkret, dalam bentuk pelbagai kebijakan (politis, ekonomis) yang tujuannya untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan para guru dan dosen. Selain itu, sebenarnya dosen merupakan sumber daya manusia yang diadakan untuk menjalankan sistem kerja lembaga pendidikan tinggi, yang meliputi universitas, institut, akademi dan sekolah tinggi.

Dosen merupakan pelaksana kerja yang harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas kerjanya, moralitas, kedisiplinan serta tingkat kesejahteraannya, yang kelak menciptakan kondisi dan situasi yang nyaman dalam bekerja, sehingga pada gilirannya setiap dosen mempunyai rasa memiliki, menyayangi dan persaudaraan yang kuat antar sesama dosen, dengan menyadari betapa pentingnya proses produksi pengetahuan yang diharapkan mampu mewujudkan lembaga pendidikan tinggi tingkat dunia (*world-class university*) berdasarkan kebijakan kualitas (*quality policy*) sebagai salah satu pendukung pencerdasan kehidupan bangsa.

© 2017 Komunitas Studi Kultural Indonesia. Diterbitkan oleh An1image. All rights reserved.

Pendahuluan

Pembicaraan tentang masyarakat hampir pasti melibatkan sejumlah asumsi teoretis yang berkaitan dengan dunia sosial. Mengetahui dunia sosial dengan segala bentuk dan dinamikanya mengandaikan pengamatan yang cermat, metodologi yang tepat, serta analisis yang tajam guna mengabstrakkan bongkah-bongkah fenomena, pengalaman, kejadian, peristiwa, menjadi seperangkat hipotesis yang melahirkan teori-teori sosial yang baru.

Teori-teori sosial lama yang diwariskan era pencerahan dan terus berlanjut dalam era modern seperti ide kemajuan (*progress*), diferensiasi fungsional (*functional differentiation*), spesialisasi (*specialization*), dan rasionalisasi (*rationalization*) dapat dikatakan sebagai tulang punggung atau roh penggerak dari teori-teori sosial sejak abad ke-18.

Masih terkait dengan teori-teori sosial tersebut, konsepsi masyarakat juga mengalami perkembangan, mulai dari kesadaran kolektif (Durkheim), kehendak umum (Rousseau), *Sittlichkeit* (Hegel), masyarakat borjuis dan proletar (Marx), hingga negara-bangsa (Ernest Gellner, Anthony Giddens).

Secara lugas namun kritis, Nico Stehr¹ mempertanyakan semua asumsi teoretis di atas dengan mengkonfrontasikannya dengan kenyataan sejarah yang terus berubah, yang tidak selalu tunduk pada pengarahannya teori-teori dan tindakan-tindakan manusia sebagai aktor historis (subjek pelaku tindakan sejarah) yang tidak bisa diramalkan dan selalu penuh kejutan.

Dalam hal ini, Stehr menempatkan dirinya dalam arus perdebatan atau diskursus ilmu-ilmu sosial sebagai pemikir yang memberikan ruang atau porsi analisis pada manusia sebagai subjek pelaku tindakan (*agent, human agency*) sekaligus menolak paham determinisme, entah itu determinisme material maupun teknologis.

Pandangan Stehr tentang Modernisasi dan Pengetahuan

Tesis pokok Stehr berkenaan dengan modernisasi dipahami sebagai suatu proses yang lebih terbuka, tidak segaris (*unilinear*) atau berdimensi satu (*one-dimensional*), bahkan bisa berbalik arah (*reversible*), suatu gerakan menuju perluasan tindakan sosial.

Dengan kata lain, proses modernisasi adalah seproses perluasan (*extension*) atau penataan ulang (*reconfiguration*). Pada gilirannya, proses modernisasi yang dipahami sebagai proses ekstensi atau rekonfigurasi

* Peneliti koresponden: Universitas Multimedia Nusantara, Ketua Serikat Dosen Indonesia, Penulis Berbagai buku Kajian Budaya *Mobile*: +6287882434074 | *E-mail*: hendarumn@gmail.com. Laporan penelitian pernah muncul sebagai Skripsi Program Sarjana Filsafat di STF Driyarkara, 2004 dengan judul “Masyarakat Modern Sebagai Masyarakat Pengetahuan Menurut Nico Stehr”.

menuju perluasan tindakan sosial membutuhkan aktor-aktor yang mempunyai kadar pengetahuan atau kecakapan yang memadai.

Pada pokok ini, Stehr menggarisbawahi pengetahuan sebagai mekanisme penentu identitas yang konstitutif dari masyarakat modern. Pengetahuan berdimensi individual sekaligus sosial. Dimensi sosial dari pengetahuan menjadi lebih jelas ketika pengetahuan diproduksi, didistribusikan dan direproduksi.

Pengetahuan juga bukan benda mati (*a black box*) yang bersifat ahistoris dan abstrak-universal. Pengetahuan pada hakikatnya bersifat tertanam (*embedded, situated*) dan selalu dapat diakarkan pada insitinsi-insitinsi sosial yang memproduksinya, dalam proses-proses kultural, dan dalam relasinya dengan kekuasaan, kepentingan, serta variabel-variabel lain yang memengaruhinya.

Pengetahuan berbeda dari informasi. Informasi adalah bahan mentah yang tersedia secara umum, mudah diperoleh, dimiliki dan berguna, serta bersifat cukup-diri (*self-sufficient*). Sementara pengetahuan selalu mengandaikan dan menuntut sejumlah kecakapan penafsiran dan penguasaan atas situasi dan kondisi tertentu.

Pengetahuan membutuhkan subjek aktif (*an active actor*) untuk membuatnya mampu menggerakkan sesuatu. Dengan kata lain, pengetahuan bergerak dari kapasitas atau potensial menuju perwujudan atau aktualisasinya.

Dengan masuknya pengetahuan sebagai faktor konstitutif dari masyarakat modern, tatanan sosial pun tidak lagi memadai bila diperiksa atau dianalisis melalui dalam konsep dan kerangka hak milik (*property*) maupun tenaga kerja (*labor*).

Munculnya masyarakat pengetahuan dapat diasalkan pada transformasi struktur ekonomi yang di dalamnya proses-proses ekonomi (proses produksi dan distribusi) yang tadinya ditentukan oleh *input material* (seperti mineral, batu bara, dan sebagainya) sekarang lebih banyak ditentukan oleh *input simbolis* atau input yang berbasis-pada pengetahuan.

Perkembangan dunia usaha dan penambahan jumlah orang yang berprofesi dengan berbasis pengetahuan seperti penasihat, guru dan akademisi, periset dan tenaga-tenaga ahli (*expert*) di bidang pengolahan dan penyimpanan informasi (seperti internet, media massa seperti televisi dan surat kabar) menjadi bukti empiris kuat yang mengukuhkan masyarakat modern sebagai masyarakat pengetahuan.

Menggarisbawahi tesis pokoknya yaitu bahwa pengetahuan didefinisikan sebagai kapasitas untuk tindakan, Stehr mengakui bahwa dalam masyarakat

modern, pengetahuan teknis-ilmiah mempunyai tempat yang terhormat.

Pengetahuan teknis-ilmiah tidak hanya dianggap sebagai kunci untuk memecahkan misteri alam dan persoalan klasik manusia dalam relasinya dengan alam, namun juga karena pengetahuan teknis-ilmiah memampukan manusia untuk memperluas kapasitasnya untuk bertindak.

Akan tetapi keunggulan pengetahuan teknis-ilmiah bukannya tanpa keterbatasan. Institusi ilmiah sering menjadi perpanjangan tangan pihak yang berkuasa yang memakainya untuk merepresi individu-individu atau kelompok-kelompok yang menawarkan alternatif cara berpikir.

Pada poin inilah Stehr masuk ke dalam kritik eksternal atau kontekstual dari gerakan kritik terhadap rasionalitas sains.

Ia melihat bahwa pengetahuan ilmiah pun merupakan bentukan sosial (*social construction*), sehingga pertanyaan kritis yang relevan diajukan padanya adalah bagaimana faktor-faktor institusional dan kultural yang memengaruhi produksi pengetahuan dalam sains juga memengaruhi implementasi dari pengetahuan itu sebagai kapasitas untuk bertindak dalam kondisi-kondisi konkret dan praktis (sehari-hari).

Dari persoalan pengetahuan dan aspek-aspek sosiologis-praktisnya, Stehr kemudian bergerak lebih jauh ke wilayah kemungkinan penerapan pengetahuan sekaligus pembatasan atau regulasi dari (klaim-klaim) pengetahuan itu sendiri di dalam masyarakat pengetahuan.

Dalam masyarakat pengetahuan, seiring dengan mudarnya batas dan otoritas negara-bangsa, kemampuan individu-individu (atau warga negara) untuk berpartisipasi dalam politik semakin besar.

Hal ini tentu tidak terlepas dari penguasaan pengetahuan serta kecakapan politik praktis yang dimiliki oleh baik individu maupun kelompok-kelompok kecil yang tadinya termarginalisasi dalam bingkai kekuasaan politik yang lama.

Dengan kata lain, dalam masyarakat pengetahuan, semakin sulitlah bagi negara untuk memerintah secara efektif. Akan tetapi, yang menjadi pokok keprihatinan Stehr bukanlah pada krisis legitimasi yang dialami aparat pemerintah untuk bertindak atau untuk memaksakan kehendak dan aturan-aturan yang dibuatnya kepada setiap warga negara.

Stehr melihat bahwa merosotnya otoritas dan kemampuan negara untuk memerintah secara efektif di satu sisi akan membuka peluang bagi warga negara baik individu maupun kelompok untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri (lalu muncullah *civil*

society menggantikan *state-oriented society*), atau untuk menentukan kriteria-kriteria kebijakan sosial, politik, ekonomi yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan praktis mereka.

Semakin besar atau luasnya kapasitas warga negara untuk bertindak ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ada sejumlah elemen yang menambah perluasan kapasitas dari individu-individu atau kelompok-kelompok untuk melakukan tindakan politis yang berarti.

Sebagai contoh tersebarinya pendidikan atau akses untuk memperoleh pendidikan yang layak, diseminasi informasi secara massal oleh media massa seperti televisi dan surat kabar (juga Internet) dan semakin diakuinya profesi-profesi yang berbasiskan pengetahuan (*knowledge-based occupations / professions*).

Akan tetapi, benarkah dengan semakin meningkatnya kadar pengetahuan individu (*knowledgeability*), dengan serta merta membuat semakin luasnya akses individu dan subsistem-subsistem dalam masyarakat terhadap sumber-sumber informasi (seperti perpustakaan, internet, dan lain-lain) sekaligus semakin tersebarinya pengetahuan ke segala lapisan masyarakat, dapat menjamin terwujudnya suatu masyarakat yang setara dan berakhirnya era ketidaksetaraan dan kebodohan?

Rupanya tidak demikian. Stehr berargumen bahwa bentuk-bentuk baru ketidaksetaraan sosial akan bangkit seiring dengan pertumbuhan, perkembangan dan penyebaran pengetahuan.

Dominasi dan ekspansi pasar dengan logika ekonomi dan keuntungan materiilnya dalam sejumlah besar aspek kehidupan masyarakat, seperti terlihat nyata dalam bidang pendidikan, politik, sains, dan budaya, telah menjadi ancaman yang perlu diwaspadai dalam masyarakat pengetahuan.

Ancaman itu bisa berupa homogenisasi hidup sosial dan penyeragaman (*uniformity*) bentuk-bentuk kehidupan sekaligus cara-cara menghayati kehidupan itu sendiri.

Singkatnya, seiring dengan ekspansi pasar dalam masyarakat massa, Stehr mengakui adanya kemungkinan ketimpangan sosial yang diwariskan (*a hereditary form of social inequality*).

Pada sisi yang lain, globalisasi di bidang kultur, politik, ekonomi, pengetahuan---meskipun fenomena ini tidak bisa diidentikkan dengan imperialisme atau bentuk penjajahan yang baru dari satu kultur tertentu atas kultur lainnya---perlu memicu kesadaran kritis para konsumen, warga negara dan subjek pelaku tindakan yang berpengetahuan atas kompleksitas dan interdependensi jaringan relasi hidup manusia satu dengan yang lainnya.

Selain persoalan di atas, munculnya masyarakat pengetahuan juga memunculkan sejumlah isu baru dalam hidup bermasyarakat seperti *privacy*, hak cipta (*copy right*) dan pelestarian lingkungan.

Persoalan-persoalan baru ini lantas memunculkan sejenis kebutuhan baru, yaitu kebutuhan untuk mengatur klaim-klaim pengetahuan yang baru, yang pada gilirannya akan melahirkan segerak aktivitas baru di bidang politik yaitu politik pengetahuan (*knowledge politics*).

Persoalan-persoalan yang tadinya dipandang sebagai sesuatu yang mustahil berada di bawah kendali manusia, misalnya soal manipulasi genetik, sekarang menjadi subjek dari kontrol dan manipulasi. Oleh karena itulah diperlukan seperangkat tata aturan baru yang dapat mengatur persoalan-persoalan baru di bidang pengetahuan ini.

Sayangnya, penciptaan tata aturan ini tidak bisa lagi diserahkan begitu saja pada institusi sains dan teknis---sebab sudah dibuktikan bahwa pengetahuan ilmiah yang diproduksi oleh institusi sains adalah satu di antara sejumlah bentuk aktivitas sosial manusia yang terbatas secara sosial dan kultural---melainkan harus mengundang partisipan-partisipan dari ranah politik, moral, dan kultural.

Singkatnya, ada dua arus pandangan yang dideskripsikan Stehr. Yang *pertama* adanya upaya-upaya untuk mencegah intervensi negara atau lembaga-lembaga politis lainnya dalam mengatur (bisa juga diartikan sebagai 'menyetir arah') pengetahuan demi melindungi kebebasan dan objektivitas ilmu pengetahuan (sains salah satunya).

Sementara yang *satunya* adalah upaya-upaya untuk mendorong, atau setidaknya mengundang campur tangan lembaga-lembaga, pelaku-pelaku di luar komunitas ilmuwan untuk ikut memikirkan dan peduli terhadap dampak-dampak dari begitu beragamnya klaim-klaim pengetahuan yang bermunculan dewasa ini, guna menghindari kebingungan publik dan sekaligus membuat pengetahuan itu menjadi lebih efektif dan berdaya guna aplikasinya.

Emansipasi dan Pengetahuan: Kembalinya Risiko, Ketidakpastian dan Kontingensi dalam Diskursus Seputar Pengetahuan

Dalam masyarakat pengetahuan, fungsi pengetahuan tidak hanya menjadi sumber daya atau kekuasaan, namun ia juga menjadi sumber sengketa dan ketidakpastian.

Benarkah pandangan yang menyatakan bahwa *diskursus* pengetahuan dewasa ini memang menempatkan pengetahuan sebagai entitas yang berisiko, tidak pasti, dan kontingen? Bagaimana wujud pengetahuan yang berciri seperti di atas tadi?

Faktor-faktor apa yang memungkinkannya? Apakah dengan ciri-ciri tersebut, pengetahuan masih dapat mengemban misi *emansipatorisnya*?

Di manakah letak konvergensi dari sekian banyak klaim-klaim atas pengetahuan di dalam masyarakat pengetahuan?

Sejumlah pertanyaan di atas merupakan pokok-pokok yang akan penulis jawab dengan menggunakan kerangka berpikir Stehr dalam bukunya.

Penyebaran (*Diseminasi*) Pengetahuan dan Dampak-dampaknya

Salah satu motif dasar dari Era Pencerahan adalah keyakinan bahwa *diseminasi* pengetahuan dan kecakapan (*skills*) akan membawa pembebasan. Namun, pada kenyataannya dan dalam rentang perjalanan sejarah, pengetahuan dipersepsi dan dipraktikkan bukan sebagai kapasitas untuk bertindak, melainkan bersifat melumpuhkan (*incapacitating*); bukan memampukan, namun membatasi.

Bahkan, dalam analisis selanjutnya, pengetahuan dikatakan sebagai daya penindas atau manipulasi yang paling utama. Di sisi lain, diskusi tentang distribusi sosial dari pengetahuan memberi tekanan pada ketidakberdayaan dari individu-individu pelaku tindakan yang diperparah oleh kekuatan kontrol lembaga-lembaga besar seperti media atasnya. Bagaimana menganalisis dan menyikapi hal semacam ini?

Matriks Pengetahuan/Kekuasaan

Rakyat jelata umumnya dipersepsi sebagai pihak yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka yang didasarkan pada olah pengetahuan yang memadai sehingga mereka cenderung mengandalkan jasa para pakar.

Ketidakmerataan distribusi sosial dari pengetahuan cenderung membuat elit semakin menguasai dan memonopoli pengetahuan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh darinya, khususnya dalam hal penggunaan inovasi teknik.

Namun demikian, dalam masyarakat pengetahuan, lembaga-lembaga besar dan otoritas dalam pengetahuan semakin merasakan bahwa pengetahuan yang mereka miliki pelan-pelan terkikis. Pengetahuan lantas menjadi momok yang menakutkan bagi mereka.

Contohnya, menjelang pergantian abad ke-20 menuju abad ke-21 (atau milenium ke-2), ada ketakutan yang menyebar di antara para ‘pengguna komputer’ [baca: pemilik, pengakses dan pengguna aktif pengetahuan canggih di bidang teknologi informasi] di seluruh dunia, menyangkut kemungkinan aktifnya virus komputer bernama *millenium*

*bug*ⁱⁱ pada detik-detik pergantian tahun, persisnya dari 1999 ke 2000.

Dalam masyarakat yang semakin tergantung pada kecanggihan teknologi, gangguan seperti ini bisa dipandang sebagai ancaman terhadap pengetahuan teknis yang (dipandang) semakin berkembang.

Michel Crozier (1922-2013), seorang sosiolog kenamaan asal Perancis, mencoba mencari penjelasan psikologis atas fenomena ini dengan mengatakan bahwa “Pengetahuan secara tersirat mengandung risiko perubahan. Pengetahuan menghantam orang tanpa memedulikan kekurangan atau kebutuhan mereka. Ia melemparkan kaum intelektual yang sudah mapan dan dunia sosial ke dalam kekacauan.”ⁱⁱⁱ [1]

Klaim bahwa kemajuan pengetahuan mengandung dan mengundang risiko terhadap pola-pola stabilitas sosial yang sudah mapan atau mengancam sistem kepercayaan yang sudah ada biasanya dikaitkan dengan keyakinan dan ekspektasi bahwa pengetahuan ilmiah-teknis bersifat amat subversif terhadap *status quo* dan paling efektif dalam mengguncang tradisi.

Klaim tersebut merupakan pelengkap dari klaim yang mengatakan bahwa pengetahuan mempunyai kecenderungan alamiah untuk mengalir ke pihak yang berkuasa, dan bahwa ia mempunyai konsekuensi-konsekuensi untuk menyimpan dan mempertahankan (*conserving*) bila dipandang dari sudut pandang penguasa dan berdampak men-*destabil*-kan (*destabilize*) mereka yang tidak berkuasa.

Michel Foucault [2], filsuf pascastrukturalis dan sejarawan ide terkemuka asal Perancis, juga menyoroti problematika relasi kekuasaan dan pengetahuan ini dalam karyanya *Discipline and Punish: The Birth of Prison* (1975). Foucault membeberkan kerumitan pengetahuan di dalam mendisiplinkan dan merepresi subjek. Pengetahuan dan kekuasaan digambarkan seperti kembar siam.

“Kekuasaan menghasilkan pengetahuan; ... pengetahuan dan kekuasaan saling mengimplikasi secara langsung; ... tidak ada relasi kekuasaan tanpa konstitusi ranah pengetahuan yang berhubungan dengannya. Juga tidak ada pengetahuan yang tidak mengandaikan dan membangun relasi-relasi kekuasaan pada saat yang bersamaan” [1].

Lebih jauh lagi, analisis Foucault menempatkan pengetahuan praktis atau politis, sebagaimana kekuasaan, sebagai fenomena yang konteks-spesifik. Dengan kata lain, pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari praktik-praktik sosial-politis yang di dalamnya ia tertancap.

Walau demikian, kekuasaan yang bergandengan-tangan dengan pengetahuan dan diterapkan oleh negara modern untuk mengecap, menutupi, menyensor, memisahkan, melarang, menormalkan, mengawasi, dan menindas

subjek-subjek yang berada di bawahnya tidak bersifat total. Ia juga memungkinkan.

Meskipun sangat efisien dalam melakukan hal-hal tersebut di atas, matra pengetahuan/kekuasaan lebih kompleks daripada itu dan ia masih memberi ruang untuk memberdayakan mereka yang tertindas. Dengan kata lain, pengetahuan dapat memungkinkan kelompok-kelompok yang selama ini dimarginalkan pemegang kekuasaan untuk mengemansipasi diri mereka sendiri.

Berkaitan dengan penguasaan, aplikasi pengetahuan, serta dampak-dampaknya dalam masyarakat, sosiolog kontemporer asal Jerman, Ulrich Beck dalam bukunya *Risk Society: Towards a New Modernity (1992)* menggambarkan masyarakat sekarang sebagai masyarakat risiko [1].

Secara cermat Beck dapat menguraikan pandangannya bahwa risiko yang terkandung dalam penguasaan pengetahuan adalah sesuatu yang niscaya terjadi dalam masyarakat industri maju [3].

Akan tetapi, risiko-risiko ini, seperti penemuan dan pengembangan tenaga nuklir, punahnya spesies tumbuhan dan binatang tertentu, perubahan iklim global, polusi kimiawi, dan sejenisnya, dapat diantisipasi oleh komunitas ilmiah dalam dua matra pengertian.

Pertama, risiko-risiko itu sendiri diasosiasikan dengan penggunaan pengetahuan ilmiah dan teknis;

Kedua, risiko penggunaan dibentuk atau ditemukan oleh sains.

Salah satu konsekuensi dari mengadopsi dua matra pengertian ini adalah bahwa isu kesadaran ekologis yang tadinya kurang mendapat tempat dalam *diskursus* sosial-politis di masa lampau, sekarang menjadi satu keniscayaan.

Meskipun demikian, betapa pun majunya kesadaran baru ini, tetap perlu ditandaskan bahwa sains dan teknologi---entah secara langsung maupun tidak---merupakan pencipta dari risiko-risiko ini.

Ada dilema yang dihadapi oleh komunitas ilmiah di sini. Di satu sisi mereka mengantisipasi risiko yang lahir dari penemuan-penemuan baru di bidang sains dan teknologi; di sisi lain merekalah yang menciptakan risiko-risiko tersebut^{iv} [1][3].

Risiko-risiko Baru dari Pengetahuan

Stehr melihat adanya risiko lain yaitu risiko bahwa pengetahuan dalam masyarakat pengetahuan mempunyai potensi dan kapasitas *emansipatoris*.

Disebut risiko terutama jika dipandang dari sudut lembaga-lembaga pengetahuan yang sudah mapan (seperti sains) dengan otoritasnya yang sedikit demi sedikit ditandingi oleh kemampuan individu atau kelompok-kelompok kecil untuk mengorganisasi kapasitas kognitifnya dalam memecahkan suatu persoalan.

Hal ini sejalan dengan semakin mudarnya pesona ide “kemajuan” dalam masyarakat pengetahuan. *Demistifikasi* ide “kemajuan” tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya kritik yang muncul dari komunitas ilmiah itu sendiri atas ide “kemajuan.”^v

Refleksi tentang peran sosial dari pengetahuan biasanya jarang mengangkat dan mengupas secara mendalam tradisi pencerahan yang memandang pengetahuan sebagai daya pendobrak bagi upaya pembebasan individu, warga negara, pekerja, perempuan dan laki-laki.

Bahkan, seorang ilmuwan dan filsuf sains sekaliber Karl Popper [4] sendiri cenderung skeptis terhadap keuntungan-keuntungan yang (mungkin) diperoleh umat manusia dari kemajuan sains.

Menurutnya, “Kontribusi dari kemajuan sains membuat hidup manusia menjadi lebih panjang dan kaya; namun kemajuan ini juga menggiring manusia untuk menjalani hidup di bawah ancaman perang atom, dan amatlah meragukan apakah kemajuan ini lantas memberikan sumbangan bagi bertambahnya kebahagiaan manusia” [1].

Padahal, simetri kausal antara kemajuan sains dengan meningkatnya kebahagiaan manusia dikarenakan semakin banyak persoalan hidup manusia yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode dan temuan sains, sebenarnya tidak ada.

Menjodohkan pengetahuan dengan emansipasi bukan pertama-tama tergantung pada peningkatan objektivitas dari klaim-klaim pengetahuan. Akan tetapi, yang lebih menentukan adalah bahwa *dekonstruksi* mitos-mitos pengetahuan ilmiah pada gilirannya akan membantu perluasan aplikasi pengetahuan ilmiah tersebut dalam konteks sosial di luar komunitas ilmiah.

Seiring dengan gambaran sains dan ilmuwan sebagai motor penggerak keberlangsungan aktivitas sains sebagai otoritas kunci penentu pengetahuan semakin memudar, dalam arti mereka tidak lagi selalu dijadikan referensi untuk bertindak, maka semakin bertambahlah jumlah individu dan kelompok yang menggali, mengolah, dan memanfaatkan pengetahuan untuk bertindak^{vi} [1].

Apabila hal ini terus berlanjut, distribusi sosial dari pengetahuan akan mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang lebih serius bagi masyarakat, misalnya dalam hal dunia kerja, pendidikan, proses politik, dan sejenisnya.

Pertumbuhan lapangan pekerjaan yang berdasarkan pengetahuan (*knowledge-based work, knowledge-intensive work*) dan kenaikan jumlah tenaga kerja yang semakin mempunyai kecakapan kognitif, alih-alih teknis, merupakan dua contoh nyata dari semakin signifikannya pengetahuan dan kemampuan *emansipatorisnya* dalam masyarakat pengetahuan.

Meski demikian, Stehr menegaskan bahwa perluasan kapasitas individu dan kelompok-kelompok kecil untuk bertindak sama sekali tidak berimplikasi pada hilangnya kecemasan, risiko, situasi-kondisi yang tak terduga, konsekuensi-konsekuensi yang tidak diantisipasi dari tindakan sadar, atau keterbatasan-keterbatasan yang melekat dalam setiap putusan, juga tindakan yang dilakukan oleh subjek pelaku tindakan [1].

Untuk memberikan ruang analisis bagi dinamika tindakan dari subjek-subjek pelaku tindakan dalam masyarakat pengetahuan, Stehr juga membahas soal fenomena gerakan sosial modern (baru) berikut ini.

Gerakan-gerakan Sosial Modern

Apa definisi terkini tentang gerakan sosial (*social movements*)? Belum ada kesepakatan soal ini. Yang jelas bahwa gerakan sosial merupakan anak kandung dari masyarakat industri maju. Gerakan sosial belum dikenal dalam era Industri (klasik).

Gerakan sosial yang baru (GSB) adalah hasil dari perubahan struktur sosial dan juga perubahan nilai-nilai dalam masyarakat modern. Gerakan sosial berbeda dari kelas atau angkatan sosial, meskipun secara struktural ada sedikit kemiripan. Posisi kelas (*class position*) adalah fakta objektif, namun kesadaran kelas (*class consciousness*) tidak serta merta mengiringinya.

Bagi Stehr, gerakan-gerakan sosial paling baik digambarkan sebagai “gugus kegiatan yang terorganisasi, yang pembentukannya tergantung dari perubahan sosial yang cepat, yang keanggotaannya bersifat sementara, dan yang pembentukannya sama longgarnya dengan pembentukan kelas-kelas atau angkatan-angkatan sosial, yang mengejar tujuan-tujuan yang kurang lebih bisa diidentifikasi dan bisa diperdebatkan, dan (tujuan-tujuan) ini melampaui *status quo*”^{vii} [1].

Dalam kerangka definisi tersebut, gerakan-gerakan sosial merupakan fenomena struktural dan kultural. Ada tiga dimensi pilar di dalamnya, yaitu:

- (1) apa yang orang lakukan saat terlibat konflik dengan orang lain;
- (2) apa yang mereka ketahui tentang bagaimana melakukan sesuatu;

- (3) apa yang orang lain harapkan untuk mereka lakukan.

Yang membuat GSB menjadi berarti adalah pada hakikat dan volume aktivitas kognitif dan keterampilan yang ditemukan dalam organisasi sosial [1].

Kecakapan kognitif inilah yang membuat gerakan sosial berkontribusi penting dalam mengkonstruksi dunia sosial, yaitu dengan memengaruhi kebijakan publik, dengan mengolah dan mempergunakan semaksimal mungkin sumber-sumber pengetahuan yang tersedia, serta ikut berkontribusi menentukan agenda pembangunan.

Sejauh aktivitas kognitif menjadi karakteristik primer dari gerakan sosial, maka sumber-sumber pengetahuan dan strategi penggunaannya (misalnya bagaimana pengetahuan digandengkan dengan minat dan tujuan politik) menjadi bernilai lebih penting.

Stehr kemudian menyimpulkan bahwa GSB mencerminkan tipe dan gaya representasi politik yang berbeda dari (pola) tradisional, yang partisipasinya sering didominasi elite.

GSB berperan dalam mengorganisasi kegiatan-kegiatan yang di dalamnya nilai individu, kapasitas kognitif, dan kecakapan politisnya memainkan peranan yang lebih penting bagi keanggotaannya sekaligus bisa selaras dan menunjang tujuan-tujuan dari GSB tersebut [1].

Bukan hanya “sekadar” organisasi yang menampilkan dan memperjuangkan tujuan-tujuan universal sekaligus partikular yang majemuk, GSB juga mempunyai keragaman struktur organisasi dan pola-pola jenjang karir.

GSB turut mendesain konteks sosial yang di dalamnya sumber daya pengetahuan diperoleh, ditafsirkan, disebarkan dan ditransformasi menjadi pengetahuan praktis-politis.

Mengetahui dan Risiko

Apa bedanya ‘risiko’ dan ‘bahaya’? Definisi di bawah ini kiranya dapat dijadikan titik berangkat pemahaman.

“Risiko adalah situasi-situasi di mana kemungkinan kerusakan atau kehancuran di masa depan bisa dilekatkan pada keputusan individu itu sendiri, sementara bahaya berkaitan dengan kerusakan dan gangguan yang berasal dari kekuatan luar atau eksternal di mana si individu terkait tidak mempunyai kontrol apa pun atasnya”^{viii} [1].

Sayangnya, betapa pun definisi risiko dan bahaya dari inputan Niklas Luhmann [1], salah seorang teoretikus sosial paling penting abad ke-20, di atas cukup mudah dimengerti, pada kenyataannya belum ada konsep risiko yang bersifat objektif atau tertancap (*embedded*).

Dengan kata lain, belum ada definisi 'risiko' yang diterima secara universal dan secara radikal berbeda dari penggunaan sehari-hari kata 'risiko'.

Risiko dilihat sebagai suatu konstruksi sosial yang mempunyai signifikansi beraneka ragam dan yang hanya bisa dipahami bila dikaitkan dengan konteks dan tujuan sosial tertentu.

Di lain pihak, komunikasi tentang risiko telah menciptakan lapisan dan struktur konflik sosial yang baru dalam masyarakat modern yang bisa jadi lebih eksplosif daripada yang pernah dialami dalam periode negara kesejahteraan (*welfare state*).

Sejalan dengan dua kecenderungan di atas, ada gerak kembalinya ketidakpastian dalam masyarakat dan pelaku yang memproduksi ketidakpastian tersebut adalah komunitas ilmiah.

Pada saat bersamaan, ada semacam kesepakatan bahwa sains dan sistem politik yang ada sekarang harus berani menghadapi, menanggung, sekaligus mencari jalan keluar atas ketidakpastian yang diproduksi oleh klaim-klaim pengetahuan ilmiah.

Sekarang penulis sampai pada distingsi antara risiko subjektif dan risiko objektif. Risiko subjektif didefinisikan sebagai risiko yang dipandang oleh orang per orang (*individuals*). Sementara itu, risiko objektif adalah risiko sebagaimana ditentukan oleh sains dan dikalkulasi seturut dengan prinsip-prinsip formal.

Distingsi antara risiko subjektif dengan risiko objektif ini naik ke arena perdebatan para ahli terutama bila dikaitkan dengan penentuan formula risiko, yang dapat dijadikan standar pengukuran yang valid secara universal.

Ada dua kesimpulan yang bisa didapat dari penelitian tentang risiko, yaitu (1) Mustahil untuk mengembangkan konsep formal dan seragam tentang risiko; (2) Logika dari rumus $R = P \times D^{ix}$ [1], yang dipinjam dari *diskursus* komersial, tidak memadai bila diterapkan untuk 'risiko' di ruang publik.

Bila menengok kembali definisi awal dari risiko dan bahaya di atas, disepakati tiga alasan pokok yang digunakan Stehr.

Meminjam terminologi Luhmann, untuk menjelaskan mengapa bahaya teknologi dan ekologis oleh sebagian orang dipandang sebagai risiko, oleh sebagian lagi dipandang sebagai bahaya:

Pertama, Kalkulasi untung-rugi (*a cost-benefit calculation*) tidak lagi memadai untuk memasok informasi yang relevan sebelum keputusan diambil;

Kedua, ada keterpisahan mendasar antara 'hal-hal yang dianggap sebagai risiko hasil dari keputusan-keputusan' dan 'mereka yang dipengaruhi oleh risiko-risiko tersebut';

Ketiga, gangguan atau bencana teknologi dan ekologi adalah risiko *societal* atau kolektif.

Dihadapkan pada situasi ini, para pelaku tindakan hanya mempunyai pilihan atau lari dari bahaya, atau menghadapinya, atau memprotesnya.

Sementara itu, saat menyoal tentang 'kembalinya ketidakpastian dalam masyarakat' [1], bisa ditanyakan lebih jauh, 'seandainya ketidakpastian memang sudah datang dan tinggal di tengah-tengah masyarakat, apa kiranya peran publik dari ketidakpastian?'

Sekurang-kurangnya, ada tiga pokok yang bisa dijadikan pegangan untuk menilai persoalan ini, yaitu bahwa:

(1) Karakteristik dari teknologi canggih adalah bahwa kontrol total atasnya tidak mungkin (contoh: virus komputer, atau gangguan komputer lainnya; atau sistem keamanan jaringan yang bisa kacau semuanya bila salah satu komponennya dibobol / *di-hack*);

(2) Karena poin nomor satu di atas, semakin lebarlah jurang yang terbentang antara intensi dan konsekuensi dari tindakan-tindakan teknologis. Contohnya: manipulasi genetik (*genetic engineering*).

Maksud awal dari proyek manipulasi genetik memang baik, misalnya dapat mengontrol arah proses evolusi manusia serta mengurangi kemungkinan penyakit turunan, dan sejenisnya. Akan tetapi, sampai batas mana? Bagaimana dengan konsekuensi-konsekuensi etisnya? Misalnya, bagaimana mendefinisikan awal dan akhir kehidupan?

(3) Terjadinya perubahan ekologis berjangka-panjang akibat tindakan dan pengambilan keputusan yang berlangsung sehari-hari, yang meskipun tidak spektakuler, namun berdampak jauh. Misalnya: penggunaan AC, *hair spray*, parfum, obat nyamuk, dan sejenisnya, akan melubangi ozon dalam jangka panjang.

Benang merah dari ketiga proposisi di atas adalah bahwa tidak ada seorangpun yang bisa meramalkan dengan pasti betapa besar kemungkinan bahaya yang akan datang [1].

Pengambilan Keputusan dalam konteks pengetahuan yang rapuh mengandung risiko yang tidak kecil. Maksudnya, pengetahuan tentang risiko adalah sebuah entitas yang

kurang seimbang dan rapuh karena ia mendasarkan dirinya pada pendekatan hipotetis.

Proses-proses uji-coba (*trial and error processes*) dalam banyak hal digantikan oleh perencanaan jangka-panjang yang dikembangkan secara ilmiah dan analisis risiko yang menggunakan statistik, yang kesemuanya ini hanya mampu merumuskan asumsi-asumsi teoretis dan gambaran kasar tentang realitas^x [1].

Bagaimanapun juga, teori-teori risiko modern harus menghadapi persoalan bagaimana mengorganisasikan proses-proses pembelajaran dalam situasi ketidakpastian yang mendasar seperti sekarang ini, sekaligus bagaimana mengambil keputusan-keputusan di bawah payung ketidakpastian dalam sistem-sistem sosial yang terorganisasi secara rapi.

Bertambahnya pengetahuan tidak menjamin terjadinya pergeseran dari risiko menuju keamanan. Sebaliknya, “semakin banyak seseorang tahu, semakin seseorang mengetahui dengan baik bahwa seseorang tersebut tidak tahu, dan semakin ruwet jadinya kesadaran seseorang tentang risiko.

Semakin rasional seseorang mengkalkulasi dan semakin kompleks kalkulasi itu jadinya, semakin banyak aspek yang masuk dalam pertimbangan seseorang termasuk ketidakpastian di masa mendatang, yaitu risiko,” [1] demikian ditegaskan Luhmann.

Inilah paradoks yang dialami masyarakat pengetahuan: bertambah pentingnya pengetahuan secara sosial, politik dan ekonomis sejalan dengan menurunnya kemampuan masyarakat untuk ikut campur dalam urusan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk mengurangi, memindahkan kontingensi, kondisi yang tidak diinginkan, kejutan, kesialan, dan sejenisnya [1].

Pengetahuan, Ketidakpastian dan Kontingensi

Pengetahuan di masa mendatang kemungkinan besar akan disertai tidak hanya kepedulian terhadap ancaman dari masa lalu dan masa kini yang tetap bergeming sebagai ketakutan-ketakutan, namun juga menurunnya otoritas para pakar dan skeptisisme yang makin meningkat terhadap kemungkinan adanya keahlian/kepakaran yang netral, tidak memihak.

Akan tetapi, di sisi lain, kadar ketergantungan terhadap pengetahuan juga semakin bertambah. Tantangannya adalah untuk berhadapan secara langsung dengan kontingensi.

Lebih daripada periode sebelumnya dalam sejarah umat manusia, pengetahuan di pelbagai sektor masyarakat modern telah menjadi dasar dan batu pondasi bagi tindakan sosial.

Pengamatan dan analisis Stehr atas potensi maupun keberadaan berbagai masyarakat pengetahuan merupakan suatu respons terhadap pengamatan bahwa sains dewasa ini tidak hanya kunci yang membuka ruang misteri dunia, namun juga kemenjadian dunia itu sendiri (*the becoming of the world*).

Dalam masyarakat pengetahuan, kapasitas individu-individu untuk melepaskan diri mereka dari tekanan lembaga-lembaga dan gugus kolektif lainnya (tradisi, hukum, dan sejenisnya.) juga bertumbuh pesat.

Pertambahan level pengetahuan ini tidak lantas berarti kesamaan umum (*a general levelling*), justru sebaliknya yang terjadi.

Bentuk-bentuk baru ketidaksetaraan sosial yang berdasar pada pengetahuan juga semakin menyerauk. Persoalan akses ke Internet (yang di dalamnya menyimpan sumber kekayaan informasi dan pengetahuan yang luar biasa).

Misalnya, menjadi salah satu isu ketidakadilan yang paling sering diangkat dalam *diskursus* sosial, ekonomi, dan politik kontemporer^{xi} namun sekaligus sumber daya untuk mengampanyekan isu-isu ketidakadilan yang terjadi di belahan-belahan dunia terpencil yang luput dari liputan konglomerasi media.^{xii}

Bertambahnya kerapuhan dari masyarakat modern juga memunculkan sejumlah pertanyaan moral baru, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hakikat dan dasar-dasar dari pondasi etis masyarakat modern, sekaligus tanggungjawab politis tidak hanya dari kaum elite politik namun juga dari warga-negara.

Kelesuan (resesi) ekonomi yang dialami negara maju seperti Jerman (dan juga Amerika Serikat pasca krisis *subprime mortgage* Desember 2007-Juni 2009) bisa saja kesalahannya ditimpakan ke negara dan aparat-aparatnya yang tidak *becus* dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi di tengah arus perubahan globalisasi sekarang.

Kalimat penutup dari buku Stehr, “*We are only able to rely on not being able to rely on the future*” [1]. seolah-olah semakin menegaskan suasana ketidakpastian pada masa depan. Bagaimana masyarakat yang dirundung ketidakpastian mampu bertahan?

Bukan lagi optimisme era Pencerahan atau pesimisme filosofis ala filsuf Schopenhauer yang dapat diandalkan. Ketidakpastian, kontingensi dan kerapuhan dari pengetahuan, dari masyarakat dan entitas-entitas penyusunnya, bisa dilihat (dan digunakan) baik sebagai sumber daya (yang artinya “memampukan”), tapi bisa juga sebagai sesuatu yang melumpuhkan (*paralyzing*).

Pandangan Nico Stehr tentang pengetahuan dan kapasitas *emansipatoris* yang dibawanya sudah merupakan cita-cita peradaban sejak lama, paling tidak sejak fajar Era Pencerahan menyingsing.

Akan tetapi, dalam perjalanan sejarah, ternyata pengetahuan bisa juga disalahgunakan untuk menindas dan memanipulasi objek-objek yang ditelitinya. Hal ini memunculkan persoalan risiko dalam masyarakat modern.

Risiko dibedakan dari bahaya. Posisi manusia sebagai subjek pelaku tindakan (*agent*), dengan daya-daya rasionalnya, memegang peranan penting dalam mengalkulasi dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yang kelak disebut risiko.

Namun itu saja belum mencukupi. Bertambahnya pengetahuan dan *diseminasinya* dalam masyarakat bukan semata-mata dianalisis sebagai sebuah kemajuan dan perkembangan rasionalitas dalam masyarakat (berlawanan dengan paham modernitas).

“Kemajuan” di bidang sains dan teknologi memunculkan sejumlah persoalan dan paradoksnya sendiri yaitu bertambahnya risiko, dan kembalinya kontingensi dan ketidakpastian dalam *diskursus* seputar pengetahuan.

Tanggapan dan Kritik atas ide Nico Stehr tentang Masyarakat Pengetahuan

Setelah merangkumkan analisis Nico Stehr di atas, sekarang penulis akan mengkaji sejumlah kekurangan dari teori yang diajukan Nico Stehr berkaitan dengan masyarakat pengetahuan.

Kritik Internal, terkait dengan konsepsi pengetahuan itu sendiri. Meskipun tidak mengklaim dirinya sebagai pemikir pascamodernis, konsepsi pengetahuan yang diajukan Stehr dalam bukunya ini cukup dekat dengan definisi informasi dan pengetahuan yang digagas oleh salah seorang pemikir terkemuka soal pascamodern yaitu Jean-François Lyotard [5] dalam *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (1979).

Menurut Stehr, pengetahuan dimengerti sebagai (1) kapasitas untuk (melakukan) tindakan, (2) sifatnya yang kontekstual (*socially and historically situated or embedded*), dan (3) membutuhkan subjek aktif (*an active actor*) untuk membuatnya mampu menggerakkan sesuatu.

Sementara itu Lyotard, dalam pandangan sosiolog Inggris terkemuka, Frank Webster (kelahiran 1950), berargumen bahwa pengetahuan dan informasi secara mendalam berubah dalam dua macam cara yang saling berkaitan [6].

Pertama, Pengetahuan dan informasi diproduksi hanya jika mereka bisa dinilai (dijustificasi) berdasarkan efisiensi dan efektivitas atau dalam terminologi khas Lyotard, prinsip

performativitas (a principle of performativity). Hal ini berarti informasi dikumpulkan, dianalisis dan dihasilkan kembali (direproduksi) hanya jika mereka bisa dinilai berdasarkan kriteria kegunaannya (*utility*).

Kedua, pengetahuan/informasi semakin diperlakukan sebagai komoditas.

Informasi semakin menjadi suatu fenomena yang bisa diperdagangkan, menjadi subjek dari mekanisme pasar yang mempunyai kuasa menentukan *performativitas* sesuatu.

Konsekuensi dari dua cara di atas adalah tampilnya kondisi pascamodern (*a postmodern condition*) yang berupa:

(1) Jika prinsip *performativitas* diterapkan, maka informasi/pengetahuan yang tidak bisa dinilai dalam *terma* efisiensi dan efektivitas akan dikesampingkan atau bahkan ditinggalkan.

Contohnya: pengetahuan estetis dan filosofis tidak begitu mudah diterangkan dalam *terma performance*, sementara pengetahuan atau informasi di bidang keuangan dan manajemen dapat dengan mudah dinilai berdasarkan kriteria kegunaan.

(2) Perkembangan pengetahuan lantas bergeser dari universitas atau perguruan tinggi (di mana tadinya di dalamnya sejumlah elite akademisi merasa mengemban amanah untuk mencari ‘kebenaran’) menuju lembaga-lembaga pemikir independen (*think tanks*).

Seksi riset dan pengembangan dari korporasi privat dan gugus lembaga lainnya yang mengumpulkan, mengolah dan memanfaatkan informasi/pengetahuan demi alasan efisiensi dan efektivitas.

Sebagai konsekuensinya, seluruh konsep pendidikan mesti digagas ulang. Pendidikan harus dibuat ‘lebih relevan’ untuk menjawab tantangan dan kebutuhan ‘dunia kerja yang nyata’ dengan cara meningkatkan ‘kompetensi’ dan ‘kecakapan praktis’ siswa-siswi hingga mereka kelak dapat menjadi pekerja-pekerja yang lebih efisien dan efektif.

(3) Sebagai konsekuensi dari redefinisi dari pendidikan ini, konsep ‘kebenaran’ yang sudah mapan dirongrong, dan proses *komodifikasi* menggiring seseorang untuk mendefinisikan kebenaran dalam *terma* kegunaan (praktis).

Kebenaran bukan lagi fakta yang tak terbantahkan dan (buah dari) aspirasi atau penemuan akademisi yang bekerja di universitas. Kebenaran-kebenaran

(*truths*) didefinisikan oleh permintaan-permintaan praktis yang akan dijawab oleh institusi yang bersangkutan.

(4) Akhirnya, kriteria *performativitas* yang diterapkan pada informasi/pengetahuan mengubah ide-ide tentang apa artinya menjadi seseorang yang terdidik. Sudah cukup lama masyarakat menerima anggapan bahwa menjadi orang terdidik berarti memiliki pengetahuan tertentu.

Dengan diciptakannya komputer, dan era komputerisasi terus berlangsung sejak itu, yang lebih berarti adalah bagaimana seseorang bisa mengakses bank data yang cocok daripada memiliki (dalam arti menyimpan) pengetahuan di dalam kepalanya.

Pada era pascamodern, persoalan 'bagaimana menggunakan komputer' lebih penting daripada pengetahuan yang dimiliki pribadi (*personal knowledge*).

Meskipun keempat kondisi pascamodern seperti digambarkan Lyotard di atas tidak semuanya identik dengan teori dari Stehr tentang masyarakat pengetahuan, namun bisa menemukan sejumlah kemiripan, misalnya:

(1) kemiripan dalam menentukan kriteria apa yang dianggap sebagai pengetahuan dan informasi yaitu apa yang berguna secara praktis (*'prinsip performativitas'* dalam terminologi Lyotard; 'kapasitas untuk bertindak' dalam terminologi Stehr);

(2) pergeseran sentral-sentral pengetahuan dari universitas (Lyotard) dan lembaga-lembaga besar seperti sains yang tadinya dianggap otoritatif dalam pengetahuan (Stehr) menjadi kelompok-kelompok independen (*think tanks, pressure groups*, lembaga-lembaga riset dan pengembangan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sejenisnya) yang menantang otoritas tradisional di bidang pengetahuan;

(3) Semakin dihargai dan bernilainya profesi yang berdasarkan pengolahan data, informasi dan pengetahuan. Dalam hal ini Lyotard menunjukkan bahwa mereka yang cakap menggunakan komputer dan mempunyai akses ke jaringan komputer akan lebih memenuhi permintaan pasar dan kriteria *performativitas*.

Sementara Stehr menunjukkan bahwa dalam masyarakat pengetahuan pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan pengetahuan (*knowledge-based occupations*) seperti *experts, counselors* dan *advisers* menjadi indikator penting bahwa

masyarakat modern telah bertransformasi menjadi masyarakat pengetahuan [1].

Bagaimana ia bisa menjustifikasi 'kebenaran' dari klaim pengetahuan itu sendiri? Jika pandangan ini diiyakan, tidakkah yang tersisa sekarang adalah pengetahuan-pengetahuan, dengan kebenaran-kebenarannya sendiri? Tidakkah ini menjadi semacam relativisme kebenaran yang justru ditolak oleh pengetahuan?

Menurut penulis, ada faktor yang kurang dielaborasi oleh Stehr dalam analisis sosiologisnya, yaitu soal *veritistic dimension of (social) knowledge*. Pengetahuan tidak bisa direduksi menjadi gugus potensi saja.

Kalaupun kebenaran dari pengetahuan-pengetahuan itu tergantung dari konteksnya, seseorang masih bisa bertanya lebih jauh, "konteks-konteks semacam apa atau praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan mana yang lebih bisa diandalkan, atau, dengan kata lain, yang kadar *trustworthy* dan *reliability*-nya lebih tinggi?"

Bisa juga dirumuskan seperti ini, "dari sekian banyak klaim-klaim pengetahuan dalam masyarakat pengetahuan, bagaimana dapat ditentukan standar *epistemic* untuk menilai kebenaran dari masing-masing klaim?"

Apakah model situasi percakapan yang ideal (*the ideal speech situation*) dari Jürgen Habermas dapat dipakai sebagai kriteria kebenaran yang transendental?

Alvin I. Goldman dalam *Knowledge in a Social World*^{xiii} menangkis enam argumen yang biasa dilancarkan untuk merelatifkan dimensi kebenaran dari pengetahuan. Salah satu argumen tersebut berbunyi: "Tidak ada yang namanya kebenaran transenden. Yang masyarakat sebut 'kebenaran' sederhananya adalah yang masyarakat sepakati.

Kebenaran-kebenaran atau fakta hanyalah sekumpulan gugus kepercayaan yang sudah dinegosiasikan, produk dari konstruksi dan *fabrikasi* sosial, bukan ciri-ciri 'objektif' ataupun 'eksternal' dari kenyataan" [7].

Pokok argumen dari Goldman untuk menanggapi 'serangan terhadap kebenaran' adalah bahwa baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di arena-arena khusus seperti sains, hukum, dan pendidikan, nilai lebih diletakkan pada memiliki kepercayaan-kepercayaan yang benar (*having true beliefs*) alih-alih kepercayaan yang keliru atau ketidakpastian (*uncertainty*).

Tipe nilai ini disebut "*veritistic value*". Pendekatan *veritistic* dalam epistemologi sosial bermaksud lebih daripada sekadar deskriptif atau *eksplanatoris*. Ia bertujuan mengevaluasi atau menentukan standar normatif.

Pendekatan ini mencari cara untuk mengevaluasi praktik-praktik entah yang sudah terjadi (aktual) maupun yang masih bersifat kemungkinan (prospektif) dan dampak-dampak dari praktik-praktik tersebut atas kepercayaan yang benar maupun salah.

Meskipun kebenaran tidak banyak memainkan peranan sebagai penjelas (*eksplanatoris*) dalam kajian sosial atas pengetahuan, ia dapat memainkan peranan regulatif. Di sinilah pentingnya pendekatan *veritistic* dalam mengatur (me-regulasi) klaim-klaim pengetahuan dalam masyarakat pengetahuan.

Namun, tetap bisa dipertanyakan, bagaimanakah persisnya kebenaran dapat memainkan peranan regulatifnya kecuali kalau seseorang sudah mempunyai cara-cara untuk menentukan yang mana yang benar atau apa itu kebenaran?

Bagaimana caranya seorang epistemolog sosial dapat menegaskan kadar kebenaran dari sebuah praktik kecuali kalau ia mempunyai metode untuk menentukan apakah kepercayaan-kepercayaan yang disebabkan oleh praktik-praktik tersebut adalah benar atau salah?

Kalaupun ia sudah mempunyai metode penentuan tersebut, untuk apa ada epistemologi sosial?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, tidaklah sia-sia menggunakan cara perhitungan matematis bahwa praktik tertentu mempunyai kandungan kebenaran tertentu.

Misalnya, Goldman menunjukkan bahwa praktik inferensi Bayesian punya kecenderungan umum, atau rata-rata mampu meningkatkan 'kandungan kebenaran' (*veritistic properties*) dari kepercayaan seseorang [7].

Hal serupa juga bisa ditunjukkan secara matematis misalnya dengan cara menggabungkan (*amalgamating*) pendapat-pendapat dari para pakar dalam sebuah kelompok sehingga dapat menghasilkan keakuratan kelompok yang lebih tinggi daripada bentuk-bentuk penggabungan lainnya [7]. Dikarenakan keterbatasan ruang pengungkapan, penulis mencukupkan diri untuk tidak masuk ke dalam detil penjelasan dari kedua cara di atas.

Akhirnya, suatu aksi praktik terkadang bisa dinilai tidak memuaskan secara *veritistic* bila *evidensi* yang muncul kemudian bisa menunjukkan bahwa prinsip pedoman yang dijadikan acuan sebelumnya itu salah.

Contohnya, praktik 'pencarian kebenaran' pada Abad Pertengahan yaitu praktik pengadilan dengan cara penyiksaan (*Medieval trial by ordeal*)^{xiv} sudah banyak ditinggalkan sebab proses penyiksaan itu sendiri lebih banyak menghasilkan penilaian bersalah atau tidak akurat.

Kritik eksternal, yang menyangkut pandangan tentang pengetahuan sebagai kultur (*knowledge as culture*). Artinya pengetahuan yang digagas dalam gugus pembingkai nilai, makna dan kepercayaan. Hal ini tampaknya kurang dielaborasi oleh Stehr dalam bukunya [1].

Penulis ambil saja contoh pengetahuan di era globalisasi. Pertanyaan pokoknya bisa dirumuskan sebagai berikut: Fenomena globalisasi---dengan ciri khasnya yaitu kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi informasi---apakah mendukung atau menghambat produksi, reproduksi, distribusi dan diseminasi pengetahuan?

Misalnya: media massa yang tayangannya tidak lagi terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Informasi yang dibawa dan disiarkan televisi atau internet, misalnya, hampir tidak mengenal restriksi ruang atau waktu.

Dalam hitungan detik, peristiwa aksi teror berupa peledakan bom bunuh diri di kawasan Thamrin Jakarta pada Kamis, 14 Januari 2016 yang lalu bisa dengan cepat dan mendetil masyarakat ketahui, berkat kemajuan teknologi informasi.

Namun, demikian tilikan kritisnya, apakah kecepatan atau percepatan arus informasi ini juga menambah sesuatu pada pengetahuan?

Ataukah, analoginya, masyarakat seolah-olah terengah-engah berlari di pacuan informasi tanpa tahu untuk apa masyarakat berlari? Di sini dimunculkan soal makna atau *meaning*.

Pertumbuhan dan penambahan volume informasi tidak serta merta menghasilkan kedalaman makna atau mengubah kualitas hidup manusia yang *mengasupnya*. Bisa saja orang memiliki banyak informasi di kepalanya.

Namun apa artinya itu? Gugus pemaknaan hidup tidak bisa digantungkan melulu pada besarnya atau banyaknya informasi yang seseorang *asup*, namun pada bagaimana seseorang mampu menciptakan filter yang mampu menyaring banjir informasi tersebut sehingga tersisalah informasi-informasi yang seseorang butuhkan untuk menambah pengetahuan.

Sudah barang tentu pola semacam ini juga memiliki kelemahannya sendiri yaitu bahwa pola makna ini mengandaikan adanya suatu piramid hirarki: data, informasi, pengetahuan dan kebijaksanaan.^{xv} Semakin ke atas semakin tinggi kadar maknanya.

Soal makna dari tindakan sosial ini tentu tidak bisa dilepaskan dari bingkai pemaknaan kultural yang melingkupi subjek penafsir makna tersebut.

Di sinilah sosialitas dari makna mendapatkan tempatnya. Bukan bahwa makna yang dipercaya atau dijunjung tinggi oleh individu itu terpisah dari lingkungan sosialnya, namun bahwa makna itu diperkuat atau diperlemah bila ditempatkan dalam bingkai pemaknaan sosial yang lebih luas.

Untuk memperkuat argumentasi ini, penulis akan mengutip sejumlah gagasan dari tulisan McCarthy, *Knowledge as Culture: The New Sociology of Knowledge*.^{xvi}

Dalam bukunya tersebut, McCarthy berargumen bahwa “Dewasa ini, pengetahuan paling baik digagas dan dipelajari sebagai budaya, dan beraneka ragam pengetahuan sosial mengomunikasikan dan menandai makna-makna sosial, seperti makna tentang kekuasaan dan kenikmatan, keindahan dan kematian, kebaikan dan bahaya.

Sebagai corak budaya yang kuat, pengetahuan juga menyusun makna dan menciptakan objek-objek serta praktik-praktik sosial yang seluruhnya baru.”

Budaya (*culture*) di sini oleh McCarthy dipahami sebagai “*the changing, tenuous, and thoroughly human and contingent ground of experience and knowledge*” [8].

Konsep budaya seperti diajukan McCarthy di atas lebih memberi perhatian pada dimensi plural, kontingen, dan lokal dari eksistensi masyarakat, lebih terbuka terhadap perbedaan daripada kesatuan, dan bahkan membuka pintu lebar-lebar untuk ide konstruksi daripada esensi [8].

Salah satu contoh dari konsep pengetahuan yang digagas sebagai budaya adalah pengetahuan yang bergender (*engendered knowledge*) yang diusulkan oleh sejumlah tokoh feminis untuk mengkritik pengetahuan ilmiah (sains).

Di antaranya terbilang nama-nama intelektual seperti Donna Haraway (“pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang berangkat dari dan kembali untuk menjawab situasi khas tertentu: *a situated knowledge*”), Helen E. Longino (“sains adalah pengetahuan sosial di mana nilai-nilai sosial memainkan peran aktif dan niscaya dalam perkembangan pengetahuan itu”).

Sandra Harding (“ilmu pengetahuan sosial yang berciri kritis dan *self-reflective* seharusnya menjadi model bagi semua jenis sains lainnya dan bahwa ilmu pengetahuan alam paling tepat dianalisa sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial”).

Ruth Bleier (“sains adalah pengetahuan yang diproduksi secara sosial sekaligus institusi budaya”), Hilary Rose (“etos ilmiah adalah contoh penting dari pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dalam masyarakat”), dan Dorothy Smith (“sains sosial dan pengetahuan psikiatrik

adalah bagian vital dari strategi yang kompleks untuk mengatur, *me-manage*, dan mengelola hidup perempuan”) [8].

Benang merah yang bisa ditarik dari gugus kritik feminis ini adalah bahwa pengetahuan (ilmiah) itu merupakan konstruksi sosial dan dalam kenyataan sejarah terbukti digunakan untuk melestarikan paradigma atau budaya *patriarkal*, *androsentris* dan maskulin (putih, borjuis). Pengetahuan yang seperti itu pada gilirannya bukanlah pengetahuan yang membebaskan (seluruh) umat manusia, melainkan pengetahuan yang diskriminatif.

“Nasib” Agen Pengetahuan dalam Tatanan Masyarakat Pengetahuan: Kontekstualisasi Gagasan

Di manakah kontribusi guru dan dosen sebagai agen pengetahuan dalam konstelasi masyarakat pengetahuan sebagaimana digagas Nico Stehr?

Apakah secara umum pasca rezim otoriter Orde Baru 1998, terjadi penguatan dan perluasan kapasitas serta kapabilitas mereka atau justru para guru dan dosen malah terhisap dalam hegemoni kekuasaan (baru) dan *domestifikasi* kekuatan?

Jika diletakkan dalam konteks sosial politik ke-Indonesia-an pasca Gerakan Reformasi, maka apakah dosen-dosen di Indonesia sudah menubuhkan prinsip-prinsip masyarakat pengetahuan seperti diuraikan oleh Stehr di atas? Atau justru sebaliknya, semakin tergilas dan terlibas oleh kapitalisasi dan privatisasi pengetahuan?

Pertama-tama perlu dipahami bahwa pembentukan Serikat Dosen Indonesia (SDI) merupakan bagian dari Gerakan Sosial Baru (GSB) yang tidak ketat terafiliasi pada entitas kolektif Marxis seperti kelas, ataupun nasionalisme.

Meskipun secara objektif profesi guru dan dosen sudah selalu meletak dalam ‘posisi kelas’ (*class position*) tertentu, tegasnya, kelas menengah ke bawah, akan tetapi tidak serta merta kehadiran dalam posisi kelas itu bereskalasi menjadi “kesadaran kelas” yang merupakan jalan penting bagi terwujudnya solidaritas kelas.

Kesadaran palsu (*false consciousness*) tentang guru dan dosen yang diproduksi, direproduksi, dan dilembagakan oleh *the ruling class* yaitu negara dengan aparatnya selama era Orde Baru.

Adagium “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa” sudah sedemikian mengakar dalam lubuk kesadaran para guru dan (calon) guru di seluruh negeri, sehingga penguasaan pengetahuan yang dianggap dimiliki oleh para guru dan dosen tidak serta merta selaras dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, peningkatan kesejahteraan secara bertahap, apalagi kemakmuran material.

Jika bukan guru dan dosen itu sendiri yang berjuang untuk mengafirmasi relasi pengetahuan dan kekuasaan, untuk mengemansipasi diri dari situasi ketertindasan yang sistematis, dari bentuk-bentuk ketidaksetaraan sosial yang berlandung di balik alasan saleh nan manipulatif.

“Guru (dosen) adalah pengabdian masyarakat tanpa tanda jasa”, maka tidak perlu berharap terlalu banyak bahwa ada pihak lain yang akan memerhatikan, apalagi memperjuangkannya secara konkret, dalam bentuk pelbagai kebijakan (politis, ekonomis) yang tujuannya untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan para guru dan dosen.

Oleh karena itu, dalam Pembukaan Anggaran Dasar Serikat Dosen Indonesia [9] yang sudah disahkan oleh notaris pada 28 Oktober 2014 yang lalu, kristalisasi dari kesadaran kelas dan solidaritas kelas para dosen yang sudah ‘tercerahkan’ ini dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya dosen merupakan salah satu pilar utama eksistensi lembaga pendidikan tinggi dalam menjalankan proses penciptaan, penyebaran, dan pembaruan pengetahuan yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi terkait dengan amanah UUD 1945 yaitu ‘pencerdasan kehidupan bangsa.’

Serikat Dosen Indonesia, disingkat SDI, merupakan bagian integral dari *civitas academica* nasional yang mendukung terlaksananya pembangunan nasional serta tercapainya kesejahteraan sosial yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, sebenarnya dosen merupakan sumber daya manusia yang diadakan untuk menjalankan sistem kerja lembaga pendidikan tinggi, yang meliputi universitas, institut, akademi dan sekolah tinggi.

Dosen merupakan pelaksana kerja yang harus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas kerjanya, moralitas, kedisiplinan serta tingkat kesejahteraannya, yang kelak menciptakan kondisi dan situasi yang nyaman dalam bekerja, sehingga pada gilirannya setiap dosen mempunyai rasa memiliki, menyayangi dan persaudaraan antar sesama dosen, dengan menyadari betapa pentingnya proses produksi pengetahuan yang diharapkan mampu mewujudkan lembaga pendidikan tinggi tingkat dunia (*world-class university*) berdasarkan kebijakan kualitas (*quality policy*) sebagai salah satu pendukung pencerdasan kehidupan bangsa.

Bahwa untuk menerapkan kebijakan kualitas dan meningkatkan produktivitas pengetahuan yang dihasilkan lembaga pendidikan tinggi secara optimal, para dosen memerlukan wadah perkumpulan berupa serikat pekerja, beserta sarana dan prasarana yang memadai sebagai media

untuk berkomunikasi, berperan serta, juga menggalang solidaritas agar mampu melindungi, mendidik dan meningkatkan harkat dan kehidupan yang layak dari dosen.

Keberadaan wadah tersebut ikut mendorong terciptanya kondisi dan situasi bekerja yang harmonis dan seimbang antara manajemen (direksi) perguruan tinggi dan himpunan dosen. Wadah yang dibentuk para dosen ini bercirikan mandiri, kuat, berwibawa, dibangun dan didirikan oleh, dari, dan untuk dosen secara kolektif, bebas dan demokratis.

Selain itu, keberadaan SDI diharapkan mampu berperan aktif mengelola aspirasi dan keluhan yang berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi para dosen, yang timbul dalam situasi dan kondisi saat ini dan masa depan, dengan berpegang pada ketentuan Undang-undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh No. 21/2000, Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003, Undang-undang Guru dan Dosen No. 14/2005, Undang-undang Pendidikan Tinggi No. 12/2012, dan undang-undang lainnya yang relevan serta prinsip keadilan sosial dan kepentingan nasional.

Maka dengan rahmat Yang Mahakuasa, kami para dosen yang mengabdikan diri sesuai keilmuan kami dalam batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyatakan diri untuk bersatu dalam SDI dengan Anggaran Dasar sebagai berikut...”

Nasib para agen pengetahuan (di antaranya adalah para guru dan dosen) dalam masyarakat pengetahuan tidak boleh berhenti pada pepatah ‘bak tikus mati di lumbung padi’.

Karakter *emansipatoris* pengetahuan yang dianggap dimiliki secara cukup oleh para guru dan dosen, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing dan jenjang pengajaran spesifik yang diampunya, perlu memberdayakan bukan hanya para peserta didik yang dipercayakan kepadanya, melainkan juga untuk menguasai dirinya (guru dan dosen) dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus mengemis dan hutang sana-sini.

Dalam arti inilah karakter sosiologis pengetahuan yang *emansipatoris* bertemu dengan nilai etis *self-respect* (kemanusiaan dalam arti yang konkret) dan *self-empowerment*.

Referensi

- [1] Nico Stehr. 2001. *The Fragility of Modern Societies: Knowledge and Risk in the Information Age*.
- [2] Foucault, M. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Random House.

- [3] Beck, U. 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: SAGE Publishing. ISBN 9-7808-0398-3465
- [4] Popper, K. R. [1961] 1992. *In Search of a Better World: Lectures and Essays from Thirty Years*. London: Routledge. ISBN 978-0-4151-3548-1
- [5] Lyotard, Jean-François. 1979. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (1979).
- [6] Webster, F. 1995. *Theories of the Information Society*. London: Routledge. ISBN 0-4151-0574-9
- [7] Goldman, A. I. 1999. *Knowledge in A Social World*. Oxford: Clarendon Press. ISBN 9-7801-9823-8201
- [8] McCarthy, E. D. 1996. *Knowledge as Culture: The New Sociology of Knowledge*. London: Routledge. ISBN 978-0-4150-6497-2
- [9] Serikat Dosen Indonesia. 2014. *Anggaran Dasar Serikat Dosen Indonesia*.

Catatan Akhir

ⁱ Nico Stehr (kelahiran 19 Maret 1942) adalah seorang sosiolog Jerman kontemporer kenamaan.

Beliau menjabat sebagai Karl Mannheim Professor untuk Ilmu Kajian Budaya di Zeppelin University, Friedrichshafen (Jerman) sekaligus Pendiri dan Direktur dari *European Center for Sustainability Research*. Beliau juga pernah menjabat sebagai Profesor Sosiologi di Universitas Alberta (Kanada) serta menjadi anggota kehormatan dari *the Center for Advanced Cultural Studies* di Essen, Jerman.

Minat dan kompetensi akademis Stehr lebih terfokus pada bidang Sosiologi Pengetahuan dan ekonomi yang berbasis pada analisis pengetahuan (*Knowledge-based Economy*).

Karya-karyanya terbentang sejak tahun 1984 lewat buku yang disusunnya bersama Volker Meja yaitu *Society and Knowledge: Contemporary Perspectives on the Sociology of Knowledge*, dilanjutkan dengan periode produktifnya pada tahun 1990-an yang menghasilkan sejumlah buku yang akan mendasari perkembangan intelektualitasnya yaitu *Practical Knowledge: Applying the Social Sciences* (1992), dan *Knowledge Societies* (1994).

Beliau juga rajin memublikasikan sejumlah esei ilmiah yang dimuat di sejumlah jurnal sosiologi dan ekonomi berskala internasional, seperti *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, *Society, Sociétés, Vorgänge*, *European Journal of Social Theory*, sehingga pada awal abad ke-21.

Namanya semakin mencuat sebagai seorang pakar sosiologi di bidang pengetahuan dan ekonomi. Salah satu buku yang ditulisnya, *The Fragility of Modern Societies: Knowledge and Risk in the Information Age* (2001) merupakan acuan pokok penulis dalam menyusun artikel ini.

ⁱⁱ Lih. <https://www.britannica.com/technology/Y2K-bug>. Bdk. Hyatt, M. S. 1998. *The Millennium Bug: How to Survive the Coming Chaos*. Regnery Publishing

ⁱⁱⁱ Stehr mengutip bagian ini dari karya Crozier, M. ([1979] 1982), *Strategies for Change: The Future of French Society*, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, hlm. 126.

^{iv} Pada bagian awal dari bab 7 bukunya, “Science Beyond Truth and Enlightenment” (hlm. 155 dst), Beck mengatakan bahwa “sains adalah salah satu penyebab, medium definisi dan sumber dari solusi atas (persoalan) risiko, dan karena fakta tersebutlah sains membuka pasar baru *scientization* untuk dirinya sendiri.”

Pada bagian berikutnya (hlm. 163), ia menyimpulkan sebagai berikut: “*One can therefore state that science is involved in the origin and deepening of risks situations in civilization and a corresponding threefold crisis consciousness. Not only does the industrial utilization of scientific results create problems; science also provides the means – the categories and the cognitive equipment – to recognize and present the problems as problems at all, or just not to do so. Finally, science also provides the prerequisites for ‘overcoming’ the threats for which it is responsible itself.*”

^v Bdk. Harry Redner (1987), “Progress as Rationality”, dalam *The Ends of Science: An Essay in Scientific Authority*, hlm. 51-59. Pertama-tama Redner mendistingsikan pertumbuhan rasionalitas sepanjang sejarah ilmu pengetahuan di Barat menjadi tiga tahapan (tiga epos) di mana masing-masing tahapan digerakkan oleh tiga bentuk dasar dari rasionalitas yang dominan.

Pertama, Nalar (*Reason*) dominan antara periode klasik Aristoteles hingga Abad Pertengahan.

Kedua, Rasionalisme dominan dalam sains Newton yaitu sains klasik.

Ketiga, Rasionalisasi dominan dalam sains Dunia (*World science*). Lebih jauh lagi, menurutnya, konsep “kemajuan” yang berasal-muasal dari tahapan Rasionalisme dan diterapkan pada perkembangan Sains klasik, tidak bisa diterapkan (atau dijadikan standar pengukuran) begitu saja, *in the same way or in the same sense*, baik dalam tahapan Nalar (*Reason*) maupun tahapan Rasionalisasi.

^{vi} Lengkapnya berbunyi sebagai berikut, “*The need continually to reappropriate knowledge leaves its mark on knowledge, too, and it impacts on the agents engaged in reappropriation. As actors acquire ever greater skills in reappropriating knowledge, they also acquire a greater capacity to act.*”

^{vii} Lengkapnya berbunyi sebagai berikut, “*Perhaps social movements are best described as organized activities that rely for their formation on accelerated social change, a transitory membership that is as loosely constituted as are social classes or generations, and that pursues more or less clearly identifiable contentious objectives that transcend the status quo.*”

^{viii} Lengkapnya berbunyi sebagai berikut, “*Risks are situations where possible future damage can be attributed to an individual’s own decision, while dangers relate to damage and hazards from external sources over which the affected individual has no control whatsoever.*”

^{ix} Formula ini dipinjam dari istilah asuransi, di mana Risiko [R] didefinisikan sebagai produk probabilitas [P] dikali dengan skala kehancuran [D].

Formula ini hanya bisa diterapkan jika kemungkinan bencana bisa dinyatakan secara jelas dan (skala) kehancuran bisa ditentukan dalam *terma-terma* kuantitatif. Formula $R = P \times D$ dipandang sebagai model pengambilan keputusan secara rasional sebab formula ini mampu melihat hubungan antara sejumlah aktivitas yang berbeda-beda dan potensial kehancuran.

^x Dalam pengamatan Rifkin (2000), salah satu risiko dari Dunia Pengetahuan yang semakin berkembang dalam bentuknya

reproduksi dan distribusi pengetahuan, sebagaimana juga *komodifikasi* kultur ke dalam dunia komersial adalah hilangnya nilai dan makna yang tadinya terkait amat erat dengan konteks dan proses muncul, tumbuh dan berkembangnya kultur itu sendiri.

Ekspresi lahiriah dari kultur---yang di sini berarti “ekspresi manusiawi komunitas tertentu atas nilai-nilai atau makna-makna dari kehidupan yang mereka jalani secara kolektif”---seperti musik, tari, makanan, kerajinan tangan, dan sejenisnya.

Gamelan dari Jawa dan Bali, musik raï dari Aljazair, salsa dari Brazil, dan sejumlah ekspresi musikal lokal-kultural lainnya masyarakat saksikan sendiri semakin diambil alih (diadopsi) bentuknya dan lalu direproduksi, disebarakan secara global.

Namun sayangnya ekspresi kultural-lokal di atas ini tidak diindahkan maknanya atau nilai spiritual-religius yang melekat padanya. Contoh lainnya, dalam Laporan Kultur Dunia tahun 1998 yang disampaikan UNESCO.

Ditengarai ada ketegangan yang semakin meningkat antara kebudayaan (*culture*) dan komersial (*commerce*) sebagai berikut: “*The cultural values which identify and link local, regional or national communities seem in danger of being overwhelmed by the relentless forces of the global marketplace. In these circumstances, questions are raised as to how societies can manage the impacts of globalization such that local or national cultures, and the creativity that sustains them, are not damaged but rather are preserved or enhanced.*”

Akan tetapi, menurut hemat penulis, tegangan semacam ini juga sekaligus menjadi peluang bagi pelaku tindakan sosial untuk menyampaikan aspirasinya dan terlibat dalam kontestasi pengetahuan.

Sebagai pembanding lainnya, bisa mengambil deskripsi contoh dari Ulrich Beck (1992) menyangkut kegagalan rasionalitas ilmiah-teknis untuk menjelaskan (apalagi menyelesaikan) bertambahnya risiko dan ancaman dari peradaban yang dibanggunkannya: “*My thesis is that the origin of the critique of science and technology lies not in the ‘irrationality’ of the critics, but in the failure of techno-scientific rationality in the face of growing risks and threats from civilization. This failure is not merely past, but acute present and threatening future.*”

Contohnya risiko keberadaan dan operasi pembangkit nuklir bagi penduduk sekitarnya (contoh ekstrem dari kasus ini adalah ledakan Pembangkit Nuklir Chernobyl di Uni Soviet tahun 1984 yang menimbulkan aneka macam penyakit yang kompleks pada warga yang tinggal dalam radius tertentu dari pembangkit nuklir tersebut akibat menghirup debu radioaktif.

Korban tidak hanya terbatas pada satu generasi, namun bahkan bergenerasi-generasi.) Kemungkinan bencana diperhalus dengan penggunaan *warning* yang disisipi humor. Keradikalan hasil penemuan atau pencapaian teknologi tinggi ini membuat tersadar atas betapa lemah posisi seseorang di hadapan lembaga-lembaga sains dan kecanggihan riset mereka.

Sementara itu kerap kali risiko dari hasil penelitian ‘disembunyikan’ dari mata masyarakat sebab yang menjadi prioritas dari industri yang didukung oleh temuan-temuan sains dan teknologi adalah meningkatkan produktivitas, dan bukan menanggulangi atau mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin lahir daripadanya.

Yang lebih mengesankan lagi dialami oleh sejumlah orang tua di Jerman. Mereka bergabung dan lalu menuntut pada pemerintah dan industri untuk mengurangi kadar sulfur dioksida dalam udara

yang mereka hirup sebab itu mengakibatkan anak-anak mereka batuk-batuk berkepanjangan terutama di malam hari (König, *Der Stern*, April 1985).

Hal semacam ini, yang oleh kaum ilmuwan hanya disebut sebagai efek samping yang sudah laten (*‘laten side effects’*), tidak bisa dipandang sebelah mata oleh para orangtua, sebab bagi mereka, ‘efek samping’ ini menampakkan suara, wajah, mata, dan tangis (yang hadir dalam diri anak-anak mereka yang menderita).

^{xi} Bdk. Andrew Calcutt (1999), *White Noise: An A-Z of the Contradictions in Cyberculture*, London: MacMillan Press Ltd. Calcutt mencoba memetakan paradoks atau kontradiksi-kontradiksi yang terkandung dalam Budaya Cyber. Misalnya, menyangkut Kesetaraan <Elitisme, ia mengatakan bahwa “*In some quarters the information superhighway is billed as the direct route to equality. But others regard it as a terrain upon which a new elitism is already emerging.*”

^{xii} Bdk. Jim Walch (1999), *In The Net*, London & New York: Zed Books, yang berbicara tentang strategi penggunaan kemajuan teknologi informasi (dalam hal ini Internet) untuk mengkampanyekan secara global isu-isu ketidakadilan sosial (seperti di Bosnia, Timor-Timur, Papua Barat, Belgrade-Yugoslavia, Vellakulam di India Selatan, dan sejenisnya.)

^{xiii} Bagian ini merupakan pembacaan dan pemahaman penulis tentang soal Epistemologi Sosial yang rujukan primernya mengacu pada *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (<http://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=epistemology-social>), © Alvin Goldman, 2001, dilengkapi dengan pembacaan penulis terhadap buku Alvin I. Goldman (1999), *Knowledge in A Social World*, Oxford: Clarendon Press, hlm. 1-100.

^{xiv} Lih. https://web.cn.edu/kwheeler/trial_ordeal.html

^{xv} Bdk. Darius Mahdjoubi (1997), “ARCHITECTURE OF KNOWLEDGE” yang bisa diakses di http://www.gslis.utexas.edu/~darius/arc_know/arc_know.html.

Mengutip pandangan Russell Ackoff tentang pengetahuan, “*A pound of ‘data’ is worth an ounce of ‘information’; A pound of ‘information’ is worth an ounce of ‘knowledge’; A pound of ‘knowledge’ is worth an ounce of ‘understanding’; A pound of ‘understanding’ is worth an ounce of ‘wisdom’*”

Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa konfigurasi lain yang mungkin dapat digunakan untuk menggambarkan relasi antara “data”, “informasi”, “pengetahuan” dan “kebijaksanaan” adalah suatu model yang diorganisasi seturut kedalaman makna.

Di mana data dipandang sebagai elemen-elemen yang tersebar, informasi sebagai data yang berpola, pengetahuan sebagai tuntunan sah untuk bertindak (*a validated platform for action*) dan kebijaksanaan sebagai mengetahui secara implisit bagaimana untuk melahirkan, mengakses dan mengintegrasikan gugus pengetahuan.

^{xvi} McCarthy, E. D. 1996. *Knowledge as Culture: The New Sociology of Knowledge*. London and New York: Routledge. E. Doyle McCarthy adalah seorang profesor sosiologi dari Fordham University (USA). Kajian penelitian dan minatnya meliputi sosiologi pengetahuan dan kebudayaan, teori sosial dan *emotion studies*.